

# Sertifikasi Profesi Tak Bisa Dipukul Rata

Uji kompetensi menjamin kualitas SDM dan produk akhir yang dihasilkan. Jika menyangkut keselamatan, keamanan, dan hal-hal yang berpotensi *dispute* besar di masyarakat, pemerintah bisa mewajibkan sertifikasi.

Tontowi Jauhari

►► Di era globalisasi, seperti menjadi kebenaran umum, standardisasi berlaku di seluruh wilayah kehidupan. Tak hanya untuk produk yang dibutuhkan di belahan bumi lain, tapi juga untuk standardisasi kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Pencapaiannya yang cukup jelas memberikan kepastian bahwa sebuah pekerjaan dilakukan oleh ahli di bidangnya. Dengan begitu, produk akhir mampu dikontrol dan memiliki konsistensi kualitas.

Selebihnya, SDM yang telah menjalani uji kompetensi memiliki jaminan bahwa dirinya mampu berada di sebuah wilayah kerja. Tak hanya pasar lokal, pasar internasional pun memungkinkan untuk ditembus karena sistem uji kompetensi telah *comply* dengan standar-standar bertaraf internasional.

*Pointers* itulah yang menjadi titik tekan Surono, Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), mencermati pentingnya sertifikasi kompetensi. Berikut obrolan lengkapnya dengan *Media Bankir*, pertengahan Maret lalu. Petikannya:

## Sebenarnya, bagaimana sejarah sertifikasi?

Ringkasnya, awalnya sertifikasi dilakukan pada produk akhir untuk mengetahui kualitas sebuah produk. Polanya dengan mengambil sampel dari produk yang dihasilkan atau *product testing*. Tapi, pola *product testing* sulit membangun konsistensi kualitas. Hanya sampel yang memiliki kualitas baik yang diambil.

Dengan demikian, metode sertifikasi



berubah. Sertifikasi harus dibangun sejak awal, baik sistemnya maupun SDM yang menanganinya. Dengan pola ini, konsistensi mutu bisa terjaga. Apalagi, saat ini, dunia memiliki perkembangan menembus batas wilayah. Dengan demikian, seperti di perbankan, mereka harus memiliki konsistensi mutu atau kualitas yang sama antara satu cabang dengan cabang yang lain.

## Seberapa penting sertifikasi bagi bankir atau industri perbankan?

Setiap bisnis, terlebih perbankan, pasti ingin memiliki tenaga pengelola berkompentensi tinggi. Kompetensi ini tentunya harus bisa dibuktikan agar bank tersebut mendapatkan kepercayaan dari para klien yang pada akhirnya memberikan benefit bagi bisnisnya.

Dalam membangun kompetensi, secara umum, ada dua hal yang dilakukan. Pertama, membangun personel menjadi kompeten. Biasanya, (hal itu) dilakukan melalui pelatihan. Kedua, setelah kompeten, tentu kompetensi itu harus dipelihara dan dipelihara. Untuk memastikan dan memeliharanya, dilakukan sertifikasi kompetensi.

Pada langkah pertama atau pelatihan,

biasanya diterbitkan *certificate of attainment*. Sementara, sertifikasi kompetensi ditujukan untuk memastikan dan memelihara kompetensi itu. Sehingga, *tool* untuk melakukan ini adalah sertifikasi kompetensi.

Dalam sertifikasi diperlukan sistem sertifikasi yang kredibel dan sesuai dengan standar kompetensi suatu profesi. Tidak hanya yang berlaku di wilayah lokal, tapi juga sesuai dengan standar global. Jadi, ciri standar sertifikasi profesi adalah mempunyai kesesuaian atau *conformity* terhadap standar internasional. Di Indonesia, standar kompetensi ini dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang *traceable* (mampu ditelusuri) terhadap standar kompetensi internasional.

Di perbankan, kita sering mendengar sertifikasi profesi. Perbedaan antara sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi adalah basis sertifikasi. Sertifikasi kompetensi basisnya adalah kriteria. Artinya, seluruh unit unjuk kerja dalam kriteria kompetensi harus dipenuhi.

Sedangkan, kompetensi profesi basisnya adalah norma dan pengujiannya bersifat *assessment*. Artinya, dalam melakukan ujian, biasanya berupa *exam* atau ujian yang soalnya diambil dari unsur-

unsur indikator kompetensi. Uji profisiensi dibutuhkan untuk memelihara kompetensi setelah SDM sudah mengantongi sertifikat uji kompetensi. Biasanya, ini merupakan bagian dari *surveillance* atau pemeliharaan kompetensi yang dilakukan secara berkala dan periodik.

### Siapa yang lebih membutuhkan sertifikasi? Industri atau individu?

Tingkat kepentingannya sama atau keduanya memiliki kepentingan yang sama besar. Bagi industri, mereka harus bisa memastikan bahwa jasa perbankannya dioperasikan oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Dari sisi personal, dia ingin membangun *career path*-nya untuk menjadi atau menempati posisi tertentu. Dengan demikian, dia bisa menempati posisi tertentu yang diinginkan karena kompetensinya telah terbukti melalui sertifikasi tersebut.

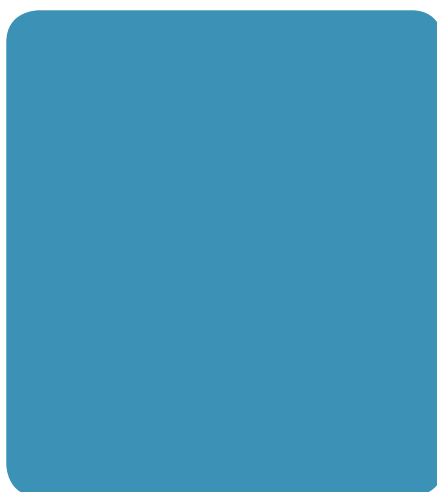
### Karena sistem uji kompetensi di Indonesia sudah *comply* dengan standar internasional, apakah bankir tak perlu mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan lembaga sertifikasi internasional?

Betul. Sekarang, yang dibutuhkan dari sistem sertifikasi adalah *competent authority*. Perbankan maupun BNSP, bisa melakukan harmonisasi dengan standar negara-negara mitra. Dengan demikian, tenaga kerja yang sudah disertifikasi di Indonesia bisa langsung masuk ke pasar negara-negara mitra.

Saat ini, Indonesia sudah melakukan harmonisasi di bidang migas untuk tenaga *offshore*. Tenaga *offshore* kita bisa langsung di-*adopt* negara lain. Demikian juga dengan bidang pariwisata. ASEAN (Association of South East Asian Nation) sudah melakukan harmonisasi. Perbankan sendiri perlu juga didorong untuk melakukannya.

Untuk melakukan itu, industri bisa memetakan apa saja yang perlu diharmonisasikan dengan standar-standar profesi di negara lain. Sehingga, nanti, otoritas kompeten perbankan dan otoritas kompeten sertifikasi bisa bersama-sama membangun harmonisasi dengan negara-negara mitra bisnis. Dengan demikian, SDM tidak lagi harus mencari sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional.

Pada dasarnya, ISO (International Organization for Standardization) itu merupakan standar minimal. Biasanya, sebuah industri ingin membangun standar kompetensi sendiri sesuai yang dibutuhkan. Kalau hanya menganut standar



internasional, berarti hanya menggunakan standar minimal. Jadi, di level dasarnya, kita menggunakan standar internasional. Kalau kita punya kelebihan, kita tingkatkan standarnya sesuai dengan kebutuhan standar industri.

### Bidang kerja industri perbankan bisa dikatakan sarat moral. Bagaimana cara mengukur kompetensi di wilayah ini?

Standar kompetensi ini mengandung tiga unsur, yakni *knowledge*, *skill*, dan *attitude*. Dalam sertifikasi kompetensi, sudah ada kriteria untuk membangun *attitude* dalam menjalankan kerja. *Attitude* akan di-*assess*, sehingga memiliki standar tertentu. Hal ini sama di industri mana pun, seperti penerbangan, di mana keselamatan menjadi ukuran utama.

### Siapa yang berhak menentukan

### standar sebuah profesi? Apakah industri atau pemegang otoritas (pemerintah)?

Ciri utama standardisasi kompetensi itu dibuat oleh industri. Industri atau asosiasi industri membuat standar-standar yang diperlukan dan dikonvensikan dengan *stakeholder*. Tugas otoritas kompetensi, dalam hal ini BNSP, adalah memfasilitasi.

Namun, pemerintah bisa mewajibkan suatu standar dalam sertifikasi bila mencakup tiga hal. Satu, berkaitan dengan masalah *safety*. Dua, berkaitan dengan *security*. Tiga, memiliki potensi *dispute* besar di masyarakat.

### Bidang kerja di perbankan sangat beragam. Apakah sertifikasi bisa digeneralisasi atau harus dilakukan per bidang kerja?

Memang, dengan kondisi tersebut, industri dengan otoritasnya dan juga para profesinya bertugas memetakan sesuai dengan kebutuhan kompetensi di wilayah apa saja, seperti apa standardisasinya, dan unsur-unsur lain yang harus dipenuhi dalam suatu bidang kerja.

Melalui pemetaan tersebut, bisa dilihat jelas kebutuhannya, sehingga sertifikasi bisa dilakukan sesuai dengan pemetaan tersebut. Dengan demikian, jika industri membutuhkan tenaga di bidang kerja tertentu, mereka bisa lebih mudah dan jelas melihat apa saja yang dibutuhkan atau harus dipenuhi oleh profesional untuk memenuhi posisi tersebut. Dengan kata lain, sertifikasi dilakukan per bidang kerja atau sesuai bidang kerja. □



*Pengurus dan anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI) turut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Drajat B. Prasetyo, Direktur Utama Bank Agro, di Jakarta, pada 11 Maret 2009. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin.*



# Memperkuat Karakter Bankir di Tengah Krisis Finansial Global



Sertifikasi bankir yang digelar IBI diharapkan mampu mencetak SDM perbankan yang andal dan responsif. IBI merasa perlu membangun karakter bankir di tengah potensi meningkatnya risiko-risiko perbankan.

►►TAMPAKNYA, belum ada topik ekonomi lain yang mampu menandingi topik krisis finansial global yang terus menggelinding dewasa ini. Dalam berbagai kesempatan, kisruh ekonomi yang berawal di negeri Barack Hussein Obama itu selalu menjadi tema hangat. Setidaknya, menjadi *issue trigger* yang dihubungkan dengan pelbagai persoalan yang muncul belakangan.

Krisis finansial global memang sudah menjadi "tanggungjawab" bersama. Pertumbuhan ekonomi dunia yang Januari lalu melamban hingga 0,5% tak urung menjadi

kegelisahan banyak pihak. Di republik ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan paling banter 4%-5%.

Bahkan, *consensus forecast* memroyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3,9% pada Februari lalu. Di sisi lain, tren penurunan ekspor jadi momok tersendiri.

Kekhawatiran dunia usaha, termasuk perbankan, pun masih terus berlanjut hingga detik ini.

Stimulus fiskal senilai Rp73 triliun yang sudah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak lantas menyelesaikan segala masalah. Pekerjaan rumah kita masih banyak. Karena itu, secara berbarengan, industri perbankan harus menguatkan diri, saling merapatkan barisan, serta menyusun strategi dan kekuatan untuk bersama-sama melewati masa-masa yang tak menyenangkan itu.

Fundamental sektor perbankan di Tanah Air memang terbilang kokoh dan solid dalam beberapa tahun terakhir. Kendati begitu, dalam kondisi sekarang, kewaspadaan patut terus dipelihara seluruh pelaku bisnis bank. Maklum, profil risiko bisnis perbankan makin semerbak. Pelan tapi pasti, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas mulai menghardik industri. Kita tentu tak ingin mengulang masa pahit 11 tahun silam. Hari ini, perbankan pasti tak ingin menjadi pesakitan lagi.

Kekuatan organik yang dimiliki industri perbankan saat ini tentu tak lepas dari peran Bank Indonesia (BI). Berbagai kebijakannya yang akomodatif dan responsif terhadap tuntutan industri memang cukup melegakan

industri perbankan. "Kami menyambut baik kebijakan dan komunikasi yang dilakukan BI selama ini. Terlebih dalam masa krisis seperti sekarang," ujar Agus Martowardojo, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI), pada pertemuan anggota IBI yang bertajuk "Prospek Industri Perbankan di Tengah Krisis Keuangan Global" di CIMB Niaga, akhir Februari lalu.

Sebagai wadah para bankir di negeri ini, Agus menegaskan, IBI selalu siap bekerja sama dan memberikan masukan terbaiknya kepada BI dan pemerintah. Apalagi, menyangkut kebijakan industri perbankan.

IBI juga senantiasa menekankan pentingnya manajemen bank memahami dan memelihara risiko perbankan. Apalagi, dalam kondisi krisis global seperti sekarang. Selain itu, lembaga ini selalu menyerukan kepada industri perbankan agar berkompetisi secara wajar, khususnya terkait dengan ketersediaan likuiditas di masing-masing bank.

Di sisi sumber daya manusia (SDM), IBI telah melakukan pelbagai langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi, karakter, dan kedisiplinan pada *code of conduct* profesi bankir di Tanah Air. Praktiknya, IBI bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan asosiasi terkait telah menggelar program sertifikasi bankir yang disesuaikan dengan fungsi bankir bersangkutan.

Agar program ini lebih membumi di lingkungan industri perbankan nasional, dukungan penuh dari BI sangat dibutuhkan lembaga ini ke depan. Bagaimanapun, bankir—sebagai SDM perbankan—merupakan modal utama bisnis bank. Bankir yang andal dan responsif tentu harapan semua pihak. Apalagi, saat krisis, perbankan nasional tentu membutuhkan bankir-bankir andal. "Dengan sertifikasi, harapannya, bankir Indonesia bisa lebih berkarakter," tandas Agus. ▣



**Member Gathering dan Prospek Industri Perbankan**

IKATAN Bankir Indonesia (IBI) menggelar *member gathering* di Graha Niaga, kantor pusat CIMB Niaga, pada 25 Februari 2009. Acara ini dihadiri pengurus dan anggota IBI. Dalam acara ini, Budi Mulia, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), mempresentasikan makalah bertajuk "Prospek Perbankan Indonesia di Tengah Krisis Keuangan Global".